

PANCASILA SEBAGAI PENGAWAL SOLIDARITAS KEBANGSAAN

PANCASILA AS A GUARD OF NATION SOLIDARITY

Siswanto

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(Sish_jakarta@yahoo.com)

Abstrak – Lingkungan strategis bangsa Indonesia telah mendorong merosotnya solidaritas kebangsaan. Lingkungan strategis di tingkat global meliputi terjangan arus globalisasi yang telah memengaruhi pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Lingkungan di strategis tingkat regional berupa persaingan politik global negara-negara besar yang mendorong kepada konflik di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Lingkungan strategis di tingkat nasional yakni munculnya politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan aliran (SARA) untuk kepentingan politik praktis. Berbagai tantangan terhadap solidaritas tersebut mendorong gagasan untuk menjadikan Pancasila kembali sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki tiga dimensi yaitu dimensi realita, dimensi ideal, dan dimensi fleksibel. Selama ini Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, Pancasila perlu re-interpretasi dengan semangat reformasi agar bisa diterima sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis kajian pustaka. Studi ini menyimpulkan bahwa menurunnya solidaritas kebangsaan dapat diselesaikan dengan mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kata Kunci : solidaritas, kebangsaan, Pancasila

Abstract – *The strategic environment of the Indonesian people has driven the decline of national solidarity. The strategic environment at the global level includes the brunt of globalization that has influenced the thinking patterns of the Indonesian people, especially the younger generation. The strategic environment at the regional level is in the form of global political competition from major countries which have led to conflict in the South China Sea and the Korean Peninsula. The strategic environment at the national level is the emergence of identity politics and the politicization of SARA for practical political interests. Various challenges to solidarity have encouraged the idea of making Pancasila back as a way of life of Indonesian. It was based on idea that Pancasila as an ideology had three dimensions, namely dimensions of reality, ideal, and flexible. During this time, Pancasila as a way of life began to be abandoned. Therefore, Pancasila needs to be re-interpreted with enthusiasm and values of nationality and reform. This study uses library research methods and qualitative methods. This study concludes that various challenges in the context of the decline of national solidarity could be solved by returning Pancasila as the Indonesian's way of life.*

Keywords : *solidarity, nationality, Pancasila*

Pendahuluan

Dinamika politik Indonesia dari waktu ke waktu belum menempatkan Pancasila sungguh-sungguh sebagai dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan falsafah negara secara benar, melainkan dikesampingkan atau ditafsirkan sesuai dengan kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Pada masa Orde Lama disamping Pancasila, terdapat ajaran-ajaran lain misalnya, Marhaenisme, NASAKOM,¹ akibatnya, Pancasila dikesampingkan eksistensinya digantikan oleh berbagai ajaran tersebut. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat kepentingan politik sehingga Pancasila diidentikan dengan keberadaan Rezim Orde baru yang oleh sebagian besar masyarakat dinilai represif dan korup. Walaupun demokrasi pada masa Orde Baru disebut Demokrasi Pancasila, implementasi dari demokrasi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sering terjadinya pelanggaran HAM, tidak ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Hal ini berdampak buruk kepada citra masyarakat terhadap Pancasila. Konsekuensinya, pada masa Reformasi, Pancasila secara yuridis-formal

¹ Marhaenisme adalah ajaran Bung Karno tentang Sosialisme ala Indonesia dimana kaum tani miskin di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi buruh tani belaka, tetapi juga menjadi pemilik lahan walaupun dalam ukuran kecil. Nama Marhaenisme diambil oleh Sukarno dari nama seorang petani kecil di Jawa Barat bernama Marhaen. NASAKOM adalah kependekan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Waktu itu Bung Karno untuk mencoba mengadopsi ketiga aliran politik utama yang hidup di Indonesia agar dapat hidup berdampingan dan bekerja sama.

sebagai dasar negara, tetapi secara material sudah tidak menjadi referensi dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya di Indonesia. Artinya Pancasila sudah diabaikan oleh masyarakat Indonesia karena dipandang bagian dari Orde Baru. Jadi dewasa ini walaupun secara hukum Pancasila tertulis sebagai ideologi dan pandangan hidup, tetapi dalam prakteknya sudah tidak lagi menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Eksistensi bangsa Indonesia tidak bisa dipisah dari lingkungan strategisnya. Lingkungan strategis dalam tataran global, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman arus globalisasi yang tidak bisa dibendung pengaruhnya baik di sektor politik-keamanan, ekonomi/perdagangan dan sosial-budaya. Lingkungan strategis pada tataran regional, Indonesia dihadapkan pada dampak dari adanya persaingan pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan India di kawasan yang bermuara kepada terjadinya konflik di Laut Cina Selatan dan ketegangan di Semenanjung Korea. Lingkungan strategis pada tataran nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada meningkatnya isu politik identitas, ujaran kebencian di sosial media, dan politisasi agama. Masalahnya berbagai tataran lingkungan strategis di atas berdampak buruk pada solidaritas bangsa di Indonesia.

Karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai referensi dalam menjaga solidaritas

kebangsaan. Faktanya Indonesia adalah bangsa yang plural. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan aliran (SARA). Pada era Orde Baru isu SARA ini tidak boleh dibicarakan secara bebas, sehingga masyarakat tidak cukup “dewasa” menyikapi perbedaan-perbedaan. Ironisnya, ada sebagian oknum elit politik di era reformasi yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan politik praktisnya. Fenomena ini sesuatu yang kompleks. Disatu sisi, hal ini ada fakta tentang rujukannya memilih pemimpin dalam doktrin keagamaan tertentu. Disisi lain, masyarakat sekarang kurang toleran terhadap perbedaan-perbedaan sehingga mendorong kepada “fanatisme sempit” yang dapat digiring kepada konflik horizontal. Jadi Pancasila dengan dimensi fleksibilitasnya diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Jika isu SARA ini sampai meletus menjadi konflik horizontal sangat sulit untuk menyelesaikannya. Bangsa Indonesia punya pengalaman atas konflik SARA ini. Lihat saja konflik horisontal berbasis agama di Poso (Sulawesi) dan Maluku, konflik sosial berbasis etnik di Sampit (Kalimantan) sehingga perlu kesadaran para elit bahwa bermain-main dengan isu SARA risikonya sangat besar. Oleh karena itu, perlu menjadikan Pancasila sebagai solusi atas memudarnya solidaritas kebangsaan di Indonesia.

Metodologi

Kajian ini menggunakan metode kualitatif sehingga data yang ditampilkan berbentuk

narasi atau kata-kata tidak berupa angka-angka. Data narasi lazim digunakan dalam ilmu sejarah, antropologi dan ilmu politik, tetapi kini ada perkembangan dimana Ilmu Psikologi, Sosiologi, Ilmu Bahasa, Administrasi Publik, dan Pendidikan juga memakai metode kualitatif sehingga data-data yang ditampilkan juga berbentuk narasi.² Sebaliknya, penyajian dan analisis data kualitatif juga tidak hanya dalam bentuk narasi, tetapi dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang biasanya digunakan dalam metode kuantitatif. Sajian data dan analisis seperti ini lebih ringkas. Jadi tradisi dan kelengkapan dari metode kualitatif dan kuantitatif saling melengkapi.

Kajian ini dilakukan dengan sejumlah tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, situs terkait dengan topik kajian. Tahap kedua adalah reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemfokusan dan penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data. Hal ini sebagai upaya menyaring data-data untuk membangun konstruksi pemikiran tentang topik tulisan. Tahap ketiga adalah menajamkan, menggolongkan, menyortir, dan menggolongkan. Tahap ini memperjelas konstruksi gagasan dan kelompok data-data yang terkumpul.³ Keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

² Matthew B Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.1

³ *Ibid.*

Kajian ini didasarkan pemikiran tentang solidaritas dan ideologi yang cukup tajam untuk menganalisis masalah solidaritas kebangsaan. Pemikiran tersebut antara lain disampaikan oleh Laitenen dan Pessi. Keduanya menjelaskan bahwa solidaritas adalah konsep yang memuat aspek deskripsi dan normatif,⁴ pada suatu kelompok sosial atau negara. Solidaritas mencerminkan tatanan normal yang dilandasi norma-norma integrasi sosial di dalam suatu masyarakat, sedangkan lawannya adalah situasi "chaos" dan konflik didalam suatu masyarakat. Ketika norma-norma integrasi di dalam suatu masyarakat sudah mulai menipis maka dalam waktu yang bersamaan muncul potensi konflik. Jadi antara nilai integrasi dan konflik berbanding terbalik atau berlawanan arah.

Lebih jauh Laitenen dan Pessi menggambarkan bahwa konsep solidaritas setidaknya terdiri dari lima komponen, yaitu: (1). Kesadaran identitas dengan kelompoknya, (2). Ikatan sentimen, (3) Kepentingan bersama di dalam kelompok sosial, (4) berbagai nilai-nilai dan keyakinan, (5) kesediaan memberi dukungan moral kepada kelompoknya.⁵ Jika berbagai komponen ini melemah, solidaritas kelompok juga melemah; dalam tingkat kelompok masyarakat dapat menurunkan rasa persatuannya dan dalam tingkat negara atau bangsa terjadi sesuatu yang disebut menurunnya

⁴ Laitenen dan Pessi, *Solidarity: Theory and Practice: An Introduction*, (Maryland: Lexington Books, 2015), hlm.3

⁵ *Ibid.*

solidaritas kebangsaan. Ketika Ini terjadi, rasa nasionalisme dari bangsa tersebut juga menurun.

Sementara itu, nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi identitas ke-Indonesiaan secara teoritis dapat menjadikan rujukan dalam memperkokoh solidaritas kebangsaan di Indonesia. Seperti digambarkan oleh Alfian bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi ideologi, yaitu : (1) dimensi realita (2) dimensi ideal, (3) dimensi fleksibel.⁶ Alfian mensyaratkan suatu ideologi memiliki ketiga dimensi tersebut. Artinya ideologi memiliki cakupan komprehensif yaitu bisa memayungi semua kepentingan, dinamika sosial, dan visi ke depan. Jadi, suatu ideologi juga berperan mengantarkan kepada suatu cita-cita bersama sebagai bangsa.⁷

Dengan demikian, Pancasila memiliki tiga dimensi di atas sehingga memayungi semua kepentingan dan dinamika sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks pemahaman tersebut, Ideologi Pancasila juga diprediksi bisa mengantarkan kepada suatu cita-cita bersama sebagai bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur. Jadi, sesuai dengan pemahaman di atas ketika ideologi atau dasar negara itu goyah dan jauh dari masyarakatnya maka eksistensi negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, negara perlu melakukan langkah-langkah konsolidasi khususnya pihak-pihak yang memiliki peran sebagai "Benteng Pancasila" dan pengawal NKRI.

⁶ Alfian, *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 53

⁷ *Ibid.*

Guna memahami lebih jauh tentang dimensi ideologi, berikut ini adalah tinjauan atas ketiganya. Pertama, dimensi realita dipahami sebagai gambaran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan. Sinergi antara nilai-nilai dan masyarakat ini dianalogikan seperti dua sisi dari mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena ada saling ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya, kedua dimensi ideal adalah gambaran tentang cita-cita yang dikandung di dalam suatu ideologi. Jika kita mengarah kepada Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial ini yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dalam nilai keadilan sosial semua bangsa Indonesia tingkat kesejahteraannya sudah mendekati merata, tetapi juga bukan merata seperti yang dimaksud oleh paham Komunis. Merata dalam arti kesenjangan sosial sudah menyempit. Ketiga, dimensi fleksibel adalah dimensi keterbukaan atas tuntutan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi ruang kepada interpretasi baru sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ini adalah salah satu kekuatan dari Pancasila karena dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dari waktu ke waktu.

Sebagai bahan pelajaran (*lessons learned*), sejarah bangsa-bangsa di dunia telah membuktikan bahwa sejumlah negara runtuh karena mengalami krisis

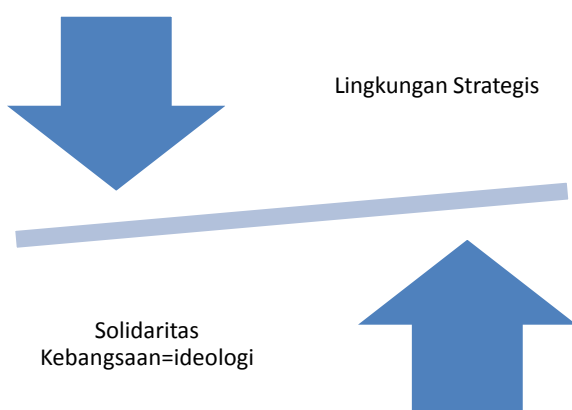
solidaritas. Misalnya Uni Soviet ambruk menjadi banyak negara yang berdaulat antara lain Georgia, Moldova, Belarus, Azerbaijan, Tajikistan dan lain-lain dengan Rusia sebagai pewaris utamanya. Kasus disintegritas nasional dari negara lain yang bisa dipetik adalah Yugoslavia terpecah-pecah menjadi sejumlah negara diantaranya Bosnia, Serbia, Slovenia.

Merujuk pada kasus disintegrasi negara Uni Soviet dan Yugoslavia, keduanya hancur karena ikatan sentimen (solidaritas) sebagai bangsa sudah tidak ada lagi di masyarakatnya. Ideologi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bersama yang merupakan ikatan sentimen sudah ditinggalkan oleh rakyatnya. Karena alasan politik, rakyat di kedua negara memilih untuk memisahkan diri atau mendirikan negara baru sesuai dengan identitas politik maupun dimensi geografi. Kasus tersebut menggambarkan negara dengan struktur masyarakatnya heterogen dan masyarakat majemuk berpotensi mengalami disintegrasi.

Jadi, ideologi Sosialis-Komunis di kedua negara sudah kehilangan fungsi perekat di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Ketika ideologinya sudah tidak didukung rakyat maka sama halnya dengan perekat dari rasa kebangsaan sudah rusak. Kondisi bisa menuju kepada runtuhnya solidaritas kebangsaan dan bubarnya sebuah negara. Berbagai komponen dari solidaritas kebangsaan yang selama ini merujuk pada ideologi Sosialis-Komunis telah melemah sejalan dengan memudarnya ideologi tersebut

di tengah-tengah masyarakat-baik di Uni Soviet maupun Yugoslavia. Hal ini sebagai analogi yang bisa menjadi instrumen memahami betapa suatu ideologi punya peran strategis dalam menjaga solidaritas dan keberlangsungan suatu bangsa. Karena punya korelasi langsung dengan solidaritas kebangsaan. Termasuk disini untuk memahami eksistensi Pancasila yang juga punya korelasi dengan keberadaan nilai-nilai solidaritas kebangsaan dimana pada akhirnya solidaritas ini juga berkorelasi dengan nasionalisme dan keberlanjutan atau eksistensi negara atau bangsa dikemudian hari.

Gambar 1. Alur Lingkungan Strategis dan Solidaritas Kebangsaan



Sumber : Diolah oleh Penulis

Pembahasan

1. Dampak Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis pada tingkat global, regional, dan nasional mempengaruhi pola pikir, perilaku rakyat, dan keberadaan ideologi Pancasila. Secara *de facto* sulit dipungkiri suatu kenyataan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup semakin ditinggalkan. Ketua Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) mensinyalir sekarang ini rakyat sudah meninggalkan Pancasila. Perilaku rakyat Indonesia sudah tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Di lingkungan MPR ada kegelisahan memandang eksistensi Pancasila karena MPR merupakan pengawal dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, dan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai berikut:

“Kalau seluruh rakyat Indonesia mau memegang Pancasila, niscaya Indonesia akan menjadi negara maju. Sayangnya saat ini justru kebanyakan kita malah meninggalkan Pancasila,”

“... kalau bangsa Indonesia memegang teguh Pancasila, maka negara akan aman dan damai. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia sendiri.”

“Kalau kita bersengketa, Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau ada rakyat kesusahan, sakit, kelaparan atau tidak bisa sekolah Pancasila mengamanahkan keadilan sosial.”⁸

Maknanya fungsi Pancasila sebagai filter nilai-nilai dan keyakinan sudah tidak efektif, dilain pihak informasi dan nilai-nilai dari dunia luar semakin intensif hadir di tengah-tengah rakyat karena di era globalisasi atau dalam konteks *Global Village* seperti sekarang ini terjadinya interaksi informasi dan ide adalah suatu keniscayaan yang hampir tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini, ide-ide tentang

⁸ Yunita, Niken Widya, “Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan,” 29 April 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soal-pancasila-yang-mulai-ditinggalkan>, diakses pada 20 Mei 2017.

Liberalisme, Hedonisme, dan Radikalisme⁹ berinteraksi dengan rakyat Indonesia dan membawa konsekuensi tersendiri kepada pola pikir dan perilaku mereka sehingga identitas ke-Indonesiaan yang selama ini menjadi ciri bangsa Indonesia seperti nilai-nilai gotong royong, tepo seliro (toleransi), musyawarah, kekeluargaan, dan saling menghormati, yang mengkristal dalam Pancasila akan terdistorsi oleh nilai-nilai yang datang dari luar tersebut. Jadi, globalisasi telah menimbulkan perubahan terhadap struktur sosial di Indonesia.

Krisis eksistensi nilai-nilai Pancasila yang sedang melanda bangsa Indonesia karena disinyalir terjadi hal seperti tersebut di atas karena bangsa Indonesia sudah meninggalkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, upaya mewacanakan transformasi terhadap eksistensi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar kembali menjadi dasar negara dan pandangan hidup. Selama era reformasi atau selama hampir dua dekade masyarakat Indonesia asing terhadap keberadaan Pancasila. Kondisi ini sesuatu yang ironis karena Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup masyarakat yang susah payah dirumuskan oleh pendiri negara. Hal ini tentu saja tidak

⁹ Liberalisme adalah aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur); usaha perjuangan menuju kebebasan. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. Lihat, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 12 Maret 2019.

boleh dibiarkan terlalu lama dan berlarut-larut sehingga pemerintah punya tanggungjawab politik untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan dinamika yang terjadi dewasa ini.

2. Ikatan Sentimen Kelompok

Nilai-nilai dan keyakinan Pancasila perlu dikembalikan ke tengah-tengah bangsa Indonesia untuk menjadi pandangan hidup kembali. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam perkembangannya dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah terjebak pada polarisasi sosial dan politik yang tidak sehat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia sudah mulai tergusur dan ditinggalkan. Sejumlah kelompok sosial di Indonesia demi mencapai kepentingannya terjebak pada konflik pemikiran, konflik opini, yang didasarkan pada semangat kebencian. Konflik pemikiran tersebut sebenarnya baik-baik saja jika dilakukan dalam semangat diskursus pemikiran secara sehat dan membangun peradaban, tetapi hal itu menjadi kontra produktif ketika didasarkan oleh semangat kebencian. Mirisnya, sejumlah elit terjebak pada hal semacam itu. Jika tidak ada langkah-langkah konkrit, hal ini bisa mengarah kepada konflik horizontal bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Aliran, dan akhirnya menuju disintegrasi bangsa Indonesia. Mendinginkan hal ini sama halnya mengikhlaskan terjadi “Balkanisasi” di Indonesia

Selain dari itu, konsep identitas ke-Indonesiaan juga menjadi konsep penting untuk menjadi alat yang menjelaskan solidaritas kebangsaan. Santoso memberi gambaran mengenai identitas ke-Indonesiaan berada di tengah-tengah kutub yaitu antara lokalitas dan globalitas. Dia berpandangan bahwa globalisasi akan membawa pengaruh kepada identitas kebangsaan karena arus globalisasi mengandung muatan sistem nilai, gaya hidup, dan pandangan hidup dari berbagai kawasan di dunia yang bebas bisa merambah masuk ke suatu negara dan berinteraksi dengan masyarakatnya, tentu saja pengaruh tadi ada yang baik dan ada pula buruk akibatnya terhadap identitas ke-Indonesiaan.¹⁰

Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya, dan berdasarkan ciri-ciri khas tersebut suatu bangsa dapat dibedakan dengan bangsa lain¹¹. Oleh karena itu,

¹⁰ Nilai yang berpengaruh buruk adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar, pandangan hidup masyarakat Indonesia dilihat dari konteks agama dan kearifan lokal, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, sedangkan nilai-nilai berpengaruh baik adalah sebaliknya yaitu nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dan bahkan memperkuat nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Lihat, Santoso Listiyono, "Penguatan Identitas ke-Indonesia-an: Mendayung di Antara Lokalisme dan Globalisme", dalam http://www.academia.edu/8509004/Penguatan_Identitas_ke-Indonesia-an_mendayung_di_Antara_Lokalisme_dan_Globalisme.

¹¹ Ruhayandi, "Meneguhkan Identitas Budaya Nasional", dalam https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan_Identitas_Budaya_Nasional?auto=download, diakses pada 23 Januari 2019.

identitas ke-Indonesiaan adalah ciri khas nilai-nilai budaya yang tumbuh di bumi Indonesia dan menjadi ciri yang membedakan dengan bangsa lain. Identitas ke-Indonesiaan dalam hal ini dipahami dari konsep sosio-kultural yang terdiri dari tiga aspek yaitu; *artifact* (*things people make*), *sosiofact* (*how people come together and for what purpose*), *mentifact* (*what people think and believe*).¹²

Selanjutnya, identitas ke-Indonesiaan dalam konteks sosial kultural di atas dan manifestasi nilai budaya Indonesia dibedakan kedalam beberapa aspek. Ketiga aspek itu adalah: (1) Identitas ke-Indonesiaan dalam aspek *artifact* ke-Indonesiaan yang khas dapat diidentifikasi kepada sejumlah karya seni; Bela diri Pencak silat, wayang kulit, gamelan, angklung, kulintang, keris, candi Borobudur, perahu pinisi, (2) Identitas ke-Indonesiaan dalam aspek *sosiofact* dapat diidentifikasi kedalam perilaku sosial khas rakyat Indonesia misalnya: nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, toleransi, harmoni, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, (3) Identitas ke-Indonesiaan dalam aspek *mentifact* yang Indonesia khas dapat diidentifikasi kepada pandangan dan harapan akan masyarakat adil makmur (loh jinawi tata tentrem kerto raharjo), aman sentosa, dan kepercayaan datangnya ratu adil.

Sementara itu, identitas budaya lokal yang berisi kearifan lokal adalah warisan nenek moyang bangsa

¹² E. Fantini Alvino, "Artifact, Sociofact, and Mentifact: a Sociocultural Framework," *New ways in Teaching Culture*, (Alexandria: Teacher of English to Speak other languages, Inc. 1995), hlm.1.

Indonesia. Identitas lokal ini menjadi rujukan berkembangnya identitas ke-Indonesiaan. Tumbuh kembangnya identitas ke-Indonesiaan sebenarnya mencerminkan tumbuh suburnya identitas lokal. Meminjam bahasa yang dipakai Santoso bahwa perkembangan identitas ke-Indonesiaan berada dalam bayang-bayang nilai-nilai lokal atau tradisional.¹³ Hal ini adalah sesuatu yang ideal karena artinya identitas ke-Indonesiaan tumbuh berkembang dengan berpijak pada akar nilai-nilainya sendiri.

Hanya saja masalah terjangan arus globalisasi demikian kuat sehingga rasanya pesimis masyarakat Indonesia steril dari pengaruh global. Sesuatu yang dibutuhkan adalah strategi menghadapinya. Setidaknya ada dua yaitu: (1) melaksanakan kebijakan *adapten* (strategi kebudayaan) yaitu menerima budaya global dengan menyesuaikan kepada budaya lokal atau nasional. Budaya global yang diambil harus terseleksi yaitu yang diambil adalah isinya buka kulitnya, cara berpikir dan cara bertindak yang benar dan baik ketimbang mengambil produk-produk budayanya (2). Menjadikan ideologi Pancasila dan kearifan lokal sebagai alat untuk menyeleksi masuknya budaya global tersebut. Keberadaan Pancasila sebagai media penyeleksi tersebut tentu saja hanya sebagai rujukan dan parameter interaksi antara budaya lokal atau nasional dengan budaya global. Konsekuensinya, budaya global yang masuk ke Indonesia bisa diterima dan memperkaya identitas

¹³ Santoso Listiyono, *op.cit.*

ke-Indonesiaan, atau sebaliknya ditolak karena tidak sejalan dengan keberadaan identitas ke-Indonesiaan itu sendiri, Pancasila, dan kearifan lokal.¹⁴

3. Dimensi Fleksibel Pancasila

Seperti disebut pada bagian sebelumnya bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga membuka ruang kepada interpretasi baru, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Disinilah letak dari kekuatan dari Pancasila karena dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan Pancasila tersebut agar tetap mampu menjadi dasar berpijak, tetap relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap mampu menjawab tantangan jaman yang berbeda dari satu era kepada era lain.

Dimensi fleksibilitas adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadi perubahan dan pembaruan agar suatu objek tetap bisa bertahan eksistensinya dari waktu ke waktu. Jika merujuk pada konsep transformasi, perubahan disini terjadi pada dimensi fungsi, bentuk, (penampilan), dan struktur dari suatu objek. Dengan demikian, ketiganya merupakan unsur utama dari suatu perubahan atau interpretasi baru.

Para pendiri negara memberi dimensi fleksibel pada Pancasila untuk mengakomodir perubahan sosial dikemudian hari. Perubahan sosial akan melahirkan perubahan-perubahan tata

¹⁴ *Ibid.*

nilai bangsa Indonesia. Nilai-nilai baru ini perlu diakomodir oleh ideologi Pancasila dengan memanfaatkan referensi lain yang mendampinginya seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Mukadimah UUD 45, batang tubuh UUD 45, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi bersifat abstrak dan universal yang mampu memayungi perubahan sosial di seluruh Indonesia, bahkan mampu memayungi dinamika internasional.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan Pancasila berdasarkan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini diatur berdasarkan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika datang era Orde Reformasi TAP MPR tersebut dicabut melalui TAP MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II. Dengan alasan materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara oleh karena itu perlu dicabut.

Sejak berlaku TAP MPR/XVIII/1998 tersebut maka P4 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini bisa dipahami karena P4 merupakan warisan Orde Baru yang menyisakan kenangan pahit kepada bangsa Indonesia. Terdapat kendala psikologi yang cukup berat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat di era Reformasi. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dengan pendekatan baru diperlukan. TAP MPR NO.XVIII/1998 memberi catatan tentang

keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, seperti dikutip di bawah ini:

Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁵

MPR melalui produk hukumnya seperti tersebut di atas sudah menyatakan melalui pasal 2 bahwa P4 dicabut, tetapi di sisi lain yaitu melalui pasal 1 juga menyatakan bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan harapan tersebut, suatu institusi perlu dibentuk yang bertanggungjawab atas hal itu. Pesan moral yang disampaikan oleh TAP MPR/XVIII/1998 kepada

¹⁵ TAP MPR/XVIII/1998 tentang pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

pemerintahan-pemerintahan di era Reformasi sudah jelas.

Pesan moral yang disampaikan oleh TAP MPR/XVIII/1998 tersebut bahwa perlu pengganti institusi yang bertanggungjawab atas keberadaan Pancasila. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu setelah P4 dicabut. Hal ini perlu dilakukan agar Pancasila dapat dilaksanakan sebagai dasar negara secara konsisten oleh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan harapan dari Pasal 1 TAP MPR/XVIII/1998.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2016, muncul wacana perlunya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Hanya saja baru 7 Juni 2017 harapan akan adanya institusi yang bertanggungjawab atas ideologi negara ini bisa terwujud. Keberadaannya ditandai dengan langkah Presiden Joko Widodo melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara. Susunan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP yang baru saja dilantik Presiden, meliputi : 1. Megawati Soekarnoputri, 2. Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, 3. Muhammad Mahfud MD, 4. Ahmad Syafi'i Ma'arif, 5. KH Ma'ruf Amin, 6. KH Said Aqil Siraj, 7. Andreas Anangguru Yawenoe, 8. Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, 9. Sudhamek AWS. UKP-PIP ini dalam kegiatan operasionalnya dipimpin oleh seorang Kepala UKP-PIP yaitu Yudi Latif.¹⁶

¹⁶ "Yudi Latif Resmi Jadi Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila", dalam <http://news.liputan6.com/read/2981038/yudi-latif-resmi-jadi-kepala-ukp-pemantapan-ideologi-pancasila>, 7 Juni 2017, diakses pada 12 Maret 2019.

4. Mengembalikan Identitas Ke-Indonesiaan

Identitas ke-Indonesiaan dalam dimensi *sociofact*¹⁷ dapat diidentifikasi ke dalam kehidupan sosial sehari—hari yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyangnya, misalnya: gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan harmoni. Sebagian kalangan menilai bahwa aspek *sociofact* ini sudah berubah sejalan dengan tekanan arus globalisasi dan Pancasila terlupakan sebagai pandangan hidup. Artinya bangsa Indonesia mengalami pergeseran nilai, dan perilaku sosial yaitu, menuju kehidupan individualis, intoleran, dan disharmoni khususnya di kota-kota besar. Akibatnya, hal ini mencemaskan sebagian masyarakat karena khawatir struktur sosial yang harmoni, rukun dan damai sudah mulai terancam. Apalagi, di beberapa wilayah Indonesia seperti di Papua terkadang terjadi konflik horizontal dan vertikal yang berpeluang mengarah kepada ancaman disintegrasi bangsa.

Terlepas dari pro-dan kontra yang sedang melanda masyarakat Indonesia, potret dinamika sosial masyarakat yang sedang terjadi perlu untuk diinformasikan dan didiskusikan. *Indonesian Police Watch* (IPW) melaporkan hasil survei pada tahun 2013 dan menggambarkan bahwa konflik sosial di Indonesia meningkat dan 6 (enam) daerah diidentifikasi rawan konflik, yaitu: 1). Papua, 2) Jawa Barat,

¹⁷ Aspek *sociofact* adalah identitas ke Indonesiaan yang menggambarkan pola-pola interaksi sosial dalam suatu komunitas baik dalam mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama (*how people come together and for what purpose*).

3). DKI 4) Sumatera Utara, 5). Sulawesi Tengah, 6). Jawa Tengah.) Jadi, suka atau tidak suka enam provinsi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang kehidupan sosialnya untuk diminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Lebih jauh digambarkan bahwa konflik sosial ini dipicu oleh berbagai dimensi sosial-budaya di masyarakat. Khususnya konflik ini meliputi dimensi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. *Cirus Surveyors* menggambarkan berdasarkan surveinya bahwa konflik di Indonesia disebabkan sejumlah masalah seperti di bawah ini.

Tabel 1. Konflik Horisontal tahun 2014

No.	Kategori Pemicu	Prosentase
1	Kemiskinan	44,3 %
2	Pengangguran	37,2 %
3	Agama	6,7 %
4	Etnis	4,1 %

Sumber: Dadang S. Anshori, "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, dalam http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf.

Dari tabel di atas dapat digambarkan tentang konflik sosial selama tahun 2014. Kategori pemicu konflik terdapat empat variabel yaitu: kemiskinan, pengangguran, agama dan etnis. Dari aspek *sociofact* konflik ini dimaknai sebagai menipisnya semangat ekonomi gotong royong atau saling membantu antara yang kelas sosial atas kepada kelas sosial bawah, akibatnya, terjadi kesenjangan sosial. Dibalik fenomena ini ada persoalan keadilan di masyarakat.

Konflik sosial di Indonesia terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun tumbuh secara perlahan, ekonomi Indonesia kian membaik yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 2,17%.¹⁸ Hal ini bergerak linier dengan tumbuhnya kelas sosial menengah baru di Indonesia yang memiliki ciri-ciri berikut: individualis atau tingkat bersosialisasi rendah, tingkat berpendidikan tinggi, tingkat pendapatan di atas rata-rata masyarakat, konsumtif, dan tingkat kesibukan tinggi.

Hal menarik lainnya adalah temuan adanya korelasi antara institusi dan kondisi di era reformasi dengan konflik sosial. Institusi-institusi di era reformasi dinilai ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya konflik sosial. Di era reformasi ini, masyarakat hidup di lingkungan lembaga politik yang berbeda dengan sebelumnya dimana kinerja lembaga pemerintah dituntut lebih maksimal. Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangan besar kepada pemerintah daerah dan kebebasan Informasi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk membuka jendela informasi lembaga-lembaga pemerintah.

¹⁸ Iswari Anggit Pramesti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 Capai 5,17%", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190206104549-17-53987/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2018-capai-517>, diakses pada 18 Maret 2019.

Tabel 2. Institusi dan Kondisi di Era Reformasi Berpotensi Menimbulkan Konflik

No.	Kebijakan dan Kinerja	Keterangan
1.	lembaga politik	Lebih mengedepankan kentingan kelompok dari pada kepentingan nasional
2	Kinerja lembaga pemerintah	Lemah penegakan hukum, kurang koordinasi, kurang adil, menimbulkan ketidakpuasan disebagian masyarakat
3.	Kebijakan otonomi daerah	Otonomi daerah menimbulkan konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah
4	Kebebasan Informasi	Kebebasan informasi memungkinkan masuknya informasi yang menyesatkan dan memecah-belah masyarakat
5	Kebebasan berpendapat	Kebebasan berpendapat mendorong orang berbicara melampaui batas kebenaran sehingga menimbulkan fitnah, dan agitasi, propaganda khususnya di sosial media

Sumber: Dadang S. Anshori, "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, dalam http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf.

5. Sosialisasi Pancasila

Dimasa Orde Baru, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dinilai sosialisasinya kurang efektif. Pegawai negeri, non-pegawai negeri pemerintah, dan masyarakat mengikuti program P4 karena instruksi, bukan karena kesadaran. Diakui, kesadaran masyarakat tidak mudah untuk dibangun agar mengikuti P4. Badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P4 yang disebut Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dinilai kurang kreatif dalam mengembangkan strategi untuk menjadikan sosialisasi Pancasila sebagai sesuatu yang disenangi dan diperlukan oleh masyarakat.

Belajar dari kegagalan Sosialisasi P4 di era Orde Baru, sosialisasi Pancasila ke depan harus bersifat terbuka. Sosialisasi perlu mendepankan nilai keterbukaan karena ini merupakan semangat dari reformasi 1998. Perlu pemikiran agar

sosialisasi Pancasila menjadi forum yang menyenangkan bagi masyarakat untuk melakukan dialog pemikiran dan bertukar gagasan secara santun dan kekeluargaan. Iklim kebebasan berpikir perlu dibangun karena merupakan langkah awal untuk mencapai kebebasan menyatakan pikiran.¹⁹

Jika mengarah kepada bentuk konflik pemikiran atau perdebatan sekalipun dalam kearifan lokal ada polanya sehingga yang sudah teruji dalam perjalanan sejarah di masa lalu. Misalnya, bukankah nenek moyang kita juga sudah biasa terlibat perdebatan dalam demokrasi desa yang berada di dalam koridor adat. Hal ini perlu menjadi referensi dalam membangun pola dialog pemikiran atau konflik pemikiran.

Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa di masa lalu nenek moyang masyarakat Indonesia juga

¹⁹ Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.45.

terlibat konflik pemikiran, tetapi dilakukan dengan penuh sopan-santun. Misalnya hal itu dilakukan dengan melalui cara berbalas pantun, menyampaikan pikiran dengan sampiran, peribahasa dan hal-hal lain. Hal ini tidak dimaksudkan agar diadopsi secara mutlak, tetapi setidaknya bisa menjadi inspirasi. Hal-hal semacam ini perlu digali karena mencerminkan nilai-nilai “Kepribadian Timur.”

Strategi lain, para peserta sosialisasi Pancasila menampakan identitas ke-Indonesiaannya. Misalnya para peserta sosialisasi Pancasila diminta menggunakan busana dan atribut daerahnya masing-masing. Hal semacam ini akan membangun kecintaannya terhadap daerahnya dan ke-Indonesiaan pada umumnya. Sekarang atribut kedaerahan dan baju daerah hampir tidak pernah digunakan kecuali oleh pasangan penganten, siswa sekolah dan guru menggunakannya pada hari-hari tertentu di sekolah. Tetapi ini tidak cukup karena atribut kedaerahan dan busana Indonesia ini juga menjadi bagian penting untuk membangun kepribadian nasional dan kecintaannya kepada Indonesia.

Pada acara sosialisasi juga bisa ditampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan daerah di Indonesia untuk membangun suasana gembira, senang, mengurangi kejenuhan, dan pengetahuan tentang berbagai seni-budaya yang ada di Indonesia. Hal semacam ini menimbulkan semangat dan rileks kepada peserta sosialisasi Pancasila dan memberi pengetahuan peserta akan beragamnya seni dan kebudayaan dari berbagai daerah

di Indonesia. Peserta dari Jawa akan mengenal Tari Serampang Dua Belas dari Sumatera, di lain pihak, peserta sosialisasi Pancasila dari Kalimantan akan mengenal Tari Topeng dari Jakarta.

Sosialisasi juga perlu menanamkan nilai gotong royong yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat khususnya di daerah elit perkotaan. Filosofi kekeluargaan, kekerabatan, tolong-menolong, dan gotong-royong perlu digali dan disampaikan kepada peserta sosialisasi. Nilai gotong royong identik dengan kebersamaan dimana hal ini sudah mulai tergusur oleh nilai-nilai individualisme khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Namun demikian, dinamika sosial di pada kelas sosial bawah mengindikasikan sesuatu yang berbeda karena nilai-nilai kekerabatan di kalangan kelas sosial ini dinilai masih kuat. Indikatornya masih banyak ditemukan kelompok arisan lingkungan, arisan keluarga, pengajian, dan masih dijumpai kerja bakti khususnya di kawasan perkotaan padat penduduk. Berbagai fenomena sosial di atas menjadi bahan analisis dari peserta sosialisasi Pancasila.

Para peserta sosialisasi juga diajak berpikir rasional bukan dogmatis seperti lazimnya suatu indoktrinasi. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan pepatah nenek moyang juga bahwa “Pikir itu pelita hati.” Ternyata menggunakan akal atau berpikir logis sudah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita. Para peserta diajak untuk meneruskan kembali kebiasaan berpikir rasional yang

diwariskan oleh nenek moyang. Hal ini perlu untuk menyikapi berbagai persoalan kehidupan sehingga mereka juga terlatih untuk menggunakan daya pikir dan kritis terhadap persoalan kehidupan. Dengan demikian, materi sosialisasi Pancasila juga harus logis dan bisa dijelaskan secara rasional. Sosialisasi Pancasila harus Pancasila tidak bersifat indoktrinasi yaitu hanya memberikan arahan-arahan tanpa kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk menyampaikan pandangannya sendiri sesuai dengan pemikirannya, keyakinannya, dan lingkungannya.

Kesimpulan

Lingkungan strategis global, regional, dan nasional bangsa Indonesia telah mendorong kepada ancaman solidaritas kebangsaan yang selama ini kokoh mengikat bangsa Indonesia. Seiring dengan hadirnya globalisasi Pancasila secara perlahan-lahan tetapi pasti ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Ikatan sentimen dalam bentuk solidaritas sebagai bangsa Indonesia berpijak pada nilai-nilai dasar masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Berbagai nilai dasar ini masyarakat diperas menjadi struktur nilai-nilai pada Pancasila.

Sumber ancaman terhadap ikatan sentimen solidaritas kebangsaan ini adalah memudarnya ideologi Pancasila dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, solusi atas ancaman melunturnya solidaritas kebangsaan tersebut adalah upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan

pendekatan baru. Seperti diketahui bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia dan sebagai pedoman menghadapi tekanan arus globalisasi. Pertimbangan ini didasarkan pada ciri ideologi Pancasila yang bersifat terbuka karena memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut: (1) dimensi realitas, (2) dimensi ideal, (3) dimensi fleksibel. Keberadaan dimensi fleksibel tersebut membuka peluang untuk melakukan reinterpretasi Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan sosialisasi Pancasila memakai pendekatan baru agar bisa diterima masyarakat dan kembali menjadi perekat solidaritas bangsa seperti sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Alfian. 1981. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta; LP3ES
- Fantini, E. Alvino. 1995. *Artifact, Sociofact, and Mentifact: a Sociocultural Framework, New Ways in Teaching Culture*. Alexandria: Teacher of English to Speak Other Languages, Inc.
- Lubis, Mochtar. 1993. *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan Michael A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Website

- Anshori, Dadang S, "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, dalam http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf.

BBC Indonesia, “Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 terus membaik”, dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160805_indonesia_ekonomi_q2, diakses pada 22 Februari 2018.

Listiyono, Santoso, “Penguatan Identitas ke-Indonesia-an: Mendayung di Antara Lokalisme dan Globalisme”, dalam http://www.academia.edu/8509004/Penguatan_Identitas_ke-Indonesia-an_Mendayung_di_Antara_Lokalisme_dan_Globalisme, diakses pada 11 Januari 2018.

Liputan 6, “Yudi Latif Resmi Jadi Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila”, dalam <http://news.liputan6.com/read/2981038/yudi-latif-resmi-jadi-kepala-ukp-pemantapan-ideologi-pancasila>, diakses pada 14 Februari 2019.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Pancasila hanya dapat diubah dengan cara makar”, dalam <http://www.mpr.go.id/posts/pancasila-hanya-dapat-diubah-dengan-cara-makar>, diakses pada 7 Maret 2017.

Pramesti, Iswari Anggit, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 Capai 5,17%”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190206104549-17-53987/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2018-capai-517>, diakses pada 18 Maret 2019.

Ruhayandi, “Meneguhkan Identitas Budaya Nasional”, dalam https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan_Identitas_Budaya_Nasional?auto=download, diakses pada 23 Januari 2019.

Yunita, Niken Widya, “Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan,” 29 April 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soalpancasila-yang-mulai-ditinggalkan>, diakses pada 20 Mei 2017.